



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 November 2024 Nomor B/ 1697/ M.SM.02.00/ 2024, Hal: Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka penyesuaian Kelas Jabatan terhadap penentuan Basik Tambahan Penghasilan Pegawai Apratur Sipil Negara, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perhitungan besaran TPP ASN di peroleh dari perkalian antara Basik TPP ASN dengan persentase TPP ASN.
- (2) Basik TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari perkalian antara tunjangan kinerja per Kelas Jabatan dengan Indeks TPP ASN.
- (3) Persentase TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. tingkat beban kerja OPD.
- (4) Persentase TPP ASN berdasarkan tingkat beban kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk per kelas jabatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Persentase TPP ASN bagi Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 33,08% (tiga puluh tiga koma nol delapan persen);

- b. Persentase TPP ASN bagi Inspektur Daerah ditetapkan sebesar 26,99% (dua puluh enam koma sembilan puluh sembilan persen);
 - c. Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN lingkup Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah ditetapkan sebesar 26,11% (dua puluh enam koma sebelas persen);
 - d. Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 25,24% (dua puluh lima koma dua puluh empat persen); dan
 - e. Persentase TPP ASN bagi Pegawai ASN di lingkungan OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan sebesar 21,76% (dua puluh satu koma tujuh puluh enam persen).
2. Ketentuan Perhitungan Besaran TPP ASN sesuai dengan jenis jabatan berdasarkan Kelas Jabatan, Persentase TPP ASN, Basik TPP, Besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan dan Indeks TPP ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 23 JUNI 2025

BUPATI BUTON SELATAN,



H. MUHAMMAD ADIOS

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 23 JUNI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE DARUS SALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 90

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 JUNI 2025

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN	INDKES TPP ASN	BASIC TPP	(%) TPP ASN	BESARAN TPP ASN	JENIS JABATAN
15	29,286,000.00	0.5998076	17,565,965.37	33,08%	5,810,821,340	Sekretaris Daerah
14	22,295,000.00	0.5998076	13,372,710.44	26,99%	3.609.294,548	Inspektur Daerah
				26,11%	3.491.614,696	Asisten Sekretaris Daerah, JF Analis Kebijakan Ahli Utama, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, JF Auditor Utama, JF Perencana Ahli Utama pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	3.375.272,120	Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala BKPSDM, JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Utama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Utama, JF Perencana Ahli Utama, JF Analis Kebijakan Ahli Utama pada Bappeda
				21,76%	2.909.901,790	Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala OPD, JF Perencana Ahli Utama, JF Analis Kebijakan Ahli Utama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Utama, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, JF Pengantar Kerja Ahli Utama, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama, JF Peggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama, JF Sandiman Ahli Utama, JF Pengawas Koperasi Ahli Utama, JF Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Peneliti Ahli Utama, dan JF Perekayasa Ahli Utama selain pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BKAD, dan Kepala BKPSDM

13	20,010,000.00	0.5998076	12,022,150.08	26,11%	3.133.761,39	Staf Ahli Bupati, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama, JF Analis Hukum dan JF Pranata Komputer Ahli Utama
				25,24%	3.029.342,680	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama pada BKAD
				21,76%	2.611.667,857	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama, JF Pengawas Sekolah Ahli Utama, JF Apoteker Ahli Utama, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Utama, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Utama, JF Teknik Pengairan Ahli Utama, JF Penata Ruang Ahli Utama, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Utama, JF Arsiparis Ahli Utama, JF Pranata Komputer Ahli Utama, JF Statistisi Ahli Utama, JF Manggala Informatika Ahli Utama, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Utama, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Utama, JF Pranata Humas Ahli Utama, JF Pamong Budaya Ahli Utama, JF Pustakawan Ahli Utama, JF Penyuluh Perikanan Ahli Utama, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama, JF Pengawas Perikanan Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Medik Veteriner Ahli Utama, JF Analis Data Ilmiah Ahli Utama, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Utama dan JF Guru Ahli Utama
12	16,000,000.00	0.5998076	9,596,921.60	26,11%	2.505.756,23	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah, JF Analis Kebijakan Ahli Madya, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, JF Auditor Madya JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Madya, dan JF Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	2.422.263,01	Sekretaris Bappeda, Sekretaris BKAD, Sekretaris BKPSDM, JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya, JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya, JF Perencana Ahli Madya, dan JF Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM
				21,76%	2,088,290.14	Kepala Bagian DPRD, Camat, Sekretaris OPD, JF Perencana Ahli Madya, JF Analis Kebijakan Ahli Madya, JF Analis SDM Aparatur Ahli Madya, JF Perencana Ahli Madya, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, JF Penata Kelola Kesehatan Lingkungan Ahli Madya, JF Pengantar Kerja Ahli Madya, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya, JF Analis

						Ketahanan Pangan Ahli Madya, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, JF Sandiman Ahli Madya, JF Manggala Informatika Ahli Madya, JF Pengawas Koperasi Ahli Madya, JF Penata Perizinan Ahli Madya, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Madya, JF Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Madya, JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Madya, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, JF Peneliti Ahli Madya, JF Perekayasa Ahli Madya, JF Pemeriksa Pajak Ahli Madya selain Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris BKAD dan Sekretaris BKPSDM
11	12,370,000.00	0.5998076	7,419,620.01	26,11%	1.937.262,785	JF Analis Hukum Ahli Madya, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Pranata Komputer Ahli Madya, JF Statistisi Ahli Madya, JF Auditor Manajemen ASN Ahli Madya dan Inspektur Pembantu/ Investigasi pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	1.872.712,09	Kepala Bidang pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM
				21,76%	1.614.509,314	Kepala Bidang pada OPD selain Kepala Bidang pada Bappeda, BKAD, dan BKPSDM, Sekretaris Camat, Kepala Bagian/Kepala Bidang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Pengembangan Penilaian Pendidikan Ahli Madya, JF Pengembang Kurikulum Ahli Madya, JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, JF Guru Ahli Madya, JF Administrator Kesehatan Ahli Madya, JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya, JF Pengawas Sekolah Ahli Madya, JF Administrator Kesehatan Ahli Madya, JF Apoteker Ahli Madya, JF Bidan Ahli Madya, JF Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Perawat Ahli Madya, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya, JF Perekam Medis Ahli Madya, JF Sanitarian Ahli Madya, JF Fisioterapis Ahli Madya, JF Nutrisionis Ahli Madya, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Madya, JF Penata Anestesi Ahli Madya, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya, JF Teknik Pengairan Ahli Madya, JF Penata Ruang Ahli Madya, JF Analis Kebakaran Ahli Madya, JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, JF Penyuluh Sosial Ahli Madya, JF Pekerja Sosial

						Ahli Madya, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, JF Administrator Database Kependudukan Ahli Madya, JF Penggerak Swada Masyarakat Ahli Madya, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya, JF Arsiparis Ahli Madya, JF Pranata Komputer, JF Statistisi Ahli Madya, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Madya, JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Madya, JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, JF Pamong Budaya Ahli Madya, JF Pustakawan Ahli Madya, JF Penyuluh Perikanan Ahli Madya, JF Pengawas Perikanan Ahli Madya, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya, JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya, JF Medik Veteriner Ahli Madya, JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Madya, JF Analisa Data Ilmiah Ahli Madya, dan JF Analisa Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya, diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM
10	10,760,000.00	0.5998076	6,453,929.78	26,11%	1.685.121,066	JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, JF Auditor Muda, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Ahli Muda, JF Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	1.628.971,876	JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda, JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda, JF Perencana Ahli Muda, dan JF Analisa Kebijakan Ahli Muda pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM
				21,76%	1.404.375,120	JF Perencana Ahli Muda, JF Analis Kebijakan Ahli Muda, JF Analis SDM Aparatur Ahli Muda, JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, JF Penata Kelola Kesehatan Lingkungan Ahli Muda, JF Pengantar Kerja Ahli Muda, JF Mediator Hubungan Industri Ahli Muda, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, JF Penggerak Swada Masyarakat Ahli Muda, JF Sandiman Ahli Muda, JF Manggala Informatika Ahli Muda, JF Pengawas Koperasi Ahli Muda, JF Penata Perizinan Ahli Muda, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, JF Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda,

						JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Muda, JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda, dan JF Penyuluh Pertanian Ali Muda, diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM
9	9,360,000.00	0.5998076	5.614.199,14	26,11%	1.465.867,40	Kepala Sub Bagian, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, JF Analis Hukum Ahli Muda, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Auditor Manajemen ASN Ahli Muda, JF Auditor Penyelia, JF Pranata Komputer Ahli Muda, dan JF Statistisi Ahli Muda pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	1.417.023,86	Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, JF Pranata Hukum Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM
				21,76%	1.221.649,73	Lurah, Kepala Sub Bagian / Seksi, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan, Kepala UPTD, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda, JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda, JF Pengawas Sekolah Ahli Muda, JF Guru Ahli Muda, JF Pranata Komputer Ahli Muda, JF Statistisi Ahli Muda, JF Administrator Kesehatan Ahli Muda, JF Epidemolog Kesehatan Ahli Muda, JF Apoteker Ahli Muda, JF Bidan Ahli Muda, JF Perawat Ahli Muda, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda, JF Terapis dan Mulut Ahli Muda, JF Perekam Medis Ahli Muda, JF Sanitarian Ahli Muda, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda, JF Fisioterapis Ahli Muda, JF Nutrisionis Ahli Muda, JF Penata Anastesi Ahli Muda, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, JF Teknik Pengairan Ahli Muda, JF Penata Ruang Ahli Muda, JF Analis Kebakaran Ahli Muda, JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda, JF Penyuluh Sosial Ahli Muda, JF Pekerja Sosial Ahli Muda, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, JF Adminisitrator Database Kependudukan Ahli Muda, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda, JF Arsiparis Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, JF Penata Kelola Informatika SPBE Ahli Muda, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Muda, JF Penata Kelola Penanaman Modal dan Ahli Muda, JF Pamong Budaya Ahli Muda, JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda, JF Pengawas Perikanan Ahli Muda, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, JF Pengawas Benih Ternak Ahli Muda, JF Medik Veteriner Ahli Muda, JF Pengawas Mutu Pakan

						Ahli Muda, JF Penyuluh Pertanian Penyelia, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Muda, JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda, JF Peneliti Ahli Muda, JF Perakayasa Ahli Muda, selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM
8	7,523,000.00	0.5998076	3,928,721.24	26,11%	1.178.175,256	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, JF Analis Hukum Ahli Pertama, JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Auditor Pertama, JF Auditor Manajemen ASN Pertama, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama, pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	1.138.917,789	JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah ASN Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM
				21,76%	981.887,919	JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Statistisi Ahli Pertama, JF Perencana Ahli Pertama, JF Analis Kebijakan Ahli Pertama, JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama, JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama, JF Pengembang Kurikulum Ahli Pertama, JF Guru Ahli Pertama, JF Administrator Kesehatan Ahli Pertama, JF Epidemolog Kesehatan Ahli Pertama, JF Apoteker Ahli Pertama, JF Pranata Komputer Ahli Pertama, JF Bidan Penyelia, JF Bidan Ahli Pertama, JF Perawat Penyelia, JF Perawat Ahli Pertama, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama, JF Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, JF Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, JF Perkam Medis Ahli Pertama, JF Sanitarian Penyelia, JF Sanitarian Ahli Pertama, JF Asisten Apoteker Penyelia, JF Fisioterapis Penyelia, JF Fisioterapis Ahli Pertama, JF Nutrisionis Penyelia, JF Nutrisionis Ahli Pertama, JF Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama, JF Teknisi Gigi Penyelia, JF Penata Anestesi Ahli Pertama, JF Teknisi Elektromedis Penyelia, JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama, JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama, JF Teknik Pengairan Ahli Pertama, JF Penata Ruang Ahli Pertama, JF Pembina Jasa Konstruksi

						Ahli Pertama, JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama, JF Analis Kebakaran Ahli Pertama, JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, JF Polisi Pamong Praja Penyelia, JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama, JF Pekerja Sosial Ahli Pertama, JF Pengantar Kerja Ahli Pertama, JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama, JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama, JF Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama, JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Pertama, JF Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama, JF Sandiman Ahli Pertama, JF Manggala Informatika Ahli Pertama, JF Penata Kelola Informasi SPBE Ahli Pertama, JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama, JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama, JF Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama, JF Pranata Humas Ahli Pertama, JF Penata Perizinan Ahli Pertama, JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, JF Pamong Budaya Ahli Pertama, JF Pustakawan Ahli Pertama, JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, JF pengawas Perikanan Ahli Pertama, JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama, JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama, JF Adyatama Keparwisiataan dan Ekraf Ahli Pertama, JF Pengawas Alat Mesin dan Pertanian Ahli Pertama, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama, JF Analis Pasar Hasil Pertanian, JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, JF Medik Veteriner Ahli Pertama, JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, JF Penyuluh Pertanian Mahir, JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, JF Pengawas Kemeterologian Ahli Pertama, JF Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Pertama, JF Peneliti Ahli Pertama, JF Perekayasa Ahli Pertama selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM
7	6,633,000.00	0.5998076	3,978,523.81	26,11%	1.038.792,567	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Pemerintahan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang - undangan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penata Layanan Operasional, Penata Keprotokoleran, JF Auditor Pelaksana lanjutan pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	1.004.179,410	Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Penata Layanan Operasional pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM

				21,76%	865.726,781	Penelaah Teknis Kebijakan, Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Penata Layanan Operasional, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Pengawas Jaringan Utilitas, Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kurator, Penata Kelola Kelautan dan Perikanan, Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Pengawas Industri, Penata Kelola Pemerintahan, JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan, JF Bidan Pelaksana Lanjutan, JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan, JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan, JF Perawat Mahir, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Mahir, JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan, JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan, JF Teknisi Elektromedis Mahir, JF Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan, JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan, JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Utama, JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Utama, JF Penyuluh Pertanian Terampil, pada OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD, dan BKPSDM
6	5,764,000.00	0.5998076	3.457.291,01	26,11%	902.698,683	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Keprotokoleraan, JF Auditor Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	872.620,251	Pengelola Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM
				21,76%	752.306,524	Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Operasional, Dokumentalis Hukum, Pengelola Layanan Kesehatan, Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang, Operator Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelola Trantibum, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan, JF Asisten Apoteker Pelaksana, JF Bidan Pelaksana, JF Fisioterapis Pelaksana, JF Nutrisionis Pelaksana, JF Perawat Terampil, JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil, JF Perekam Medis Pelaksana, JF Sanitarian Pelaksana, JF Teknisi Elektromedis Terampil, JF Teknisi Gigi Pelaksana, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula pada OPD selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM
5	4,807,000.00	0.5998076	2.883.275,13	26,11%	752.823,136	Pengadministrasi Perkantoran, Dokumentalis Hukum, Operatora Layanan Operasional pada Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah
				25,24%	727.738,643	Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional pada Bappeda, BKAD dan BKPSDM

				21,76%	627.400,668	Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Operasional, JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula, JF Polisi Pamong Praja Pemulaa diluar Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD dan BKPSDM
4	2,849,000.00	0.5998076	1,708,851.85	0	-	
3	2,354,000.00	0.5998076	1,411,947.09	21,76%	307.239,687	Pengelola Umum Operasional pada Dinas Kesehatan (UPTD Rumah Sakit Umum Daerah) dan Dinas Lingkungan Hidup
2	1,947,000.00	0.5998076	1,167,825.40	0	-	
1	1,540,000.00	0.5998076	923,703.70	0	-	

BUPATI BUTON SELATAN

H. MUHAMMAD ADIOS